

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Partai politik hadir sebagai representasi kelompok warga negara yang memiliki kemandirian dalam menjalankan perannya di dalam sistem politik. Berawal dari kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan nilai, pandangan, dan tujuan politik, partai politik berkembang menjadi institusi yang berperan penting dalam sistem demokrasi. Mereka menjalankan fungsi pencalonan kandidat untuk pemilu serta berupaya mengarahkan kebijakan pemerintahan dengan menempatkan wakil-wakilnya di posisi strategis dalam struktur negara. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu (Sulaeman, 2017).

Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh menjelaskan bahwa partai politik sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Sehingga memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial-politik, peran perempuan dalam politik semakin menjadi fokus perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional (Pradesa, 2024).

Melalui berbagai program dan kebijakan internal, partai politik dapat menjadi penggerak utama bagi peningkatan keterwakilan dan peran aktif

perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, efektivitas peran ini sangat bergantung pada komitmen dan strategi yang diterapkan oleh masing-masing partai. Beberapa partai telah menunjukkan inisiatif positif dengan membentuk sayap perempuan atau departemen khusus yang fokus pada isu-isu perempuan.

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah politik masih jauh dari optimal. *Affirmative action* kuota 30% tentang keterwakilan perempuan, senantiasa diperbaharui demi mencapai kesempurnaan dalam meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan. (Amdimas et al., 2021) Hal ini menjadikan pemberdayaan perempuan dalam politik sebagai isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius.

Pada tahun 2024, merujuk pada hasil resmi yang diterbitkan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil menempatkan 30% kader perempuannya untuk menjadi bagian dari parlemen di Provinsi Jawa Barat. Keberhasilan ini merupakan langkah penting dalam upaya pemberdayaan politik kaum perempuan, sesuai dengan komitmen partai dalam memperkuat keterwakilan perempuan di berbagai level keputusan. Keberhasilan PKS dalam menempatkan kader perempuannya di parlemen Provinsi Jawa Barat menjadi titik awal yang penting dalam upaya peningkatan sumber daya politik perempuan.

Keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai merupakan salah prasyarat untuk memastikan terpenuhinya kepentingan kaum perempuan. (Parwati & Istiningdiah, 2021) Dalam konteks partai politik Islam, konsep tadbir politik menjadi landasan penting dalam manajemen dakwah. Dalam konteks Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berhasil menempatkan kader perempuannya di parlemen Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024, penerapan konsep tadbir politik ini diduga memegang peranan penting. Keberhasilan PKS dalam meningkatkan representasi perempuan di level pengambilan keputusan ini dapat menjadi titik awal yang signifikan bagi upaya pemberdayaan politik kaum perempuan secara lebih luas.

Penelitian terdahulu oleh Niki Prasetiawan (2015) dan Asep Zaelani (2014) telah menyoroti pentingnya aspek pengorganisasian internal dalam partai politik Islam. Temuan mereka menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan anggota, termasuk perempuan, sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi, pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi dalam partai. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji bagaimana konsep tadbir politik diterapkan dalam konteks pemberdayaan perempuan di partai politik Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus pada evaluasi penerapan tadbir politik dalam manajemen dakwah Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung, khususnya di Bidang Perempuan. Studi ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana strategi pengorganisasian yang diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik dan

dakwah. Aspek-aspek yang akan diteliti meliputi struktur organisasi Bidang Perempuan, mekanisme pengambilan keputusan, program-program dalam upaya peningkatan sumber daya yang dilaksanakan, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Sebagai partai politik yang berakar pada nilai-nilai Islam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik. Namun, pendekatan yang mereka terapkan dalam memobilisasi dan memberdayakan anggota perempuan menunjukkan perbedaan yang cukup terlihat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperkuat peran perempuan dengan dua fokus utama, yaitu dengan memperkuat peran perempuan dalam konteks keluarga dan meningkatkan ketahanan keluarga secara umum. Program Rumah Keluarga Indonesia (RKI) menjadi inisiatif utama yang dirancang untuk menyediakan pemberdayaan kader perempuannya kepada masyarakat (Haq, 2024).

Aktivitas mereka yang meliputi partisipasi dalam pelatihan, seminar, serta program-program pemberdayaan yang bahkan kader perempuannya bisa menjadi bagian dari parlemen menjadikan mereka subjek yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi teoritis dalam bidang studi politik Islam dan gender, tetapi juga dapat menjadi acuan praktis bagi Partai Keadilan Sejahtera dan partai politik Islam lainnya dalam mengembangkan strategi pemberdayaan perempuan yang lebih efektif. Lebih jauh, temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya yang lebih luas dalam meningkatkan partisipasi

dan representasi perempuan dalam politik Indonesia, sekaligus memperkuat peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai level pemerintahan.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, fokus penelitian yang akan dirumuskan diantaranya:

1. Bagaimana pengorganisasian pada Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas sumber daya kader perempuannya?
2. Bagaimana implementasi dari sistem pengorganisasian di Partai Keadilan Sejahtera untuk mendukung pengembangan kader perempuan secara efektif?
3. Apa saja hambatan dan faktor penunjang dalam pengorganisasian kader perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat guna meningkatkan kualitas sumber daya kader perempuannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengkaji mekanisme pengorganisasian pada Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas sumber daya kader perempuannya.

2. Menganalisis implementasi sistem pengorganisasian di Partai Keadilan Sejahtera untuk mendukung pengembangan kader perempuan secara efektif.
3. Mengidentifikasi hambatan dan faktor penunjang dalam pengorganisasian kader perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan kualitas sumber daya kader perempuannya.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan teori manajemen dakwah dan organisasi politik dalam konteks partai Islam. Fokus utamanya adalah pengelolaan sumber daya dan upaya pemberdayaan anggota, terutama kaum perempuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas khazanah literatur mengenai strategi pemberdayaan perempuan dalam partai Islam, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya tersebut dalam meningkatkan keterlibatan politik perempuan. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam studi politik Islam, dengan fokus pada peran perempuan di dalam partai politik Islam dan bagaimana mereka diberdayakan di tingkat lokal.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi Partai Keadilan Sejahtera dan partai-partai Islam lainnya dalam

menyusun strategi pengorganisasian dan pemberdayaan kader perempuan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta mereka dalam aktivitas politik dan sosial. Studi ini juga akan menyajikan penilaian terhadap keefektifan program-program pemberdayaan perempuan yang telah dijalankan oleh Partai Keadilan Sejahtera di Provinsi Jawa Barat. Hasil evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan program-program yang ada.

Lebih lanjut, penelitian ini akan menghasilkan saran-saran praktis mengenai pengelolaan sumber daya internal partai. Fokus utamanya adalah pada pengembangan peran perempuan dan peningkatan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan partai.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	Penulis	Judul	Hasil	Metode
1	Niki Prasetiawan	Pengorganisasian basis konstituen PKB dalam meningkatkan	Pengorganisasian internal di LPP DPW PKB Jawa Barat belum optimal, terutama	Studi Deskriptif

		<p>partisipasi Politik pada Pemilu Legislatif 2014: studi deskriptif di internal LPP Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No. 580 Bandung.</p>	<p>dalam aspek spesialisasi kerja dan departementalisasi. Meskipun terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih monoton dan kurang dinamis, sehingga konsistensi kebijakan antar-divisi masih belum maksimal. Selain itu, meskipun PKB memiliki basis konstituen yang kuat dari warga Nahdliyin, dukungan riil dari basis NU terhadap PKB pada pemilu legislatif tidak</p>	
--	--	---	---	--

			sekuat yang diharapkan, terutama karena adanya persaingan dari partai-partai lain yang juga mengincar basis konstituen Nahdliyin.	
2	Asep Zaelani	Fungsi Pengorganisasian dalam Meningkatkan Kinerja Partai Dakwah (Studi Deskriptif di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat)	Pengorganisasian dakwah di DPW PKS Jawa Barat dilakukan melalui pembagian kerja yang jelas (spesialisasi), pengelompokan tugas yang sistematis (departementalisasi), dan rentang kendali yang efektif. Spesialisasi kerja memungkinkan setiap anggota partai menjalankan peran	Studi Deskriptif

			<p>yang sesuai dengan keahlian masing-masing, departementalisasi membantu mengelola tugas-tugas dakwah dengan lebih efisien, dan rentang kendali yang tepat memudahkan pengawasan dan pengendalian kegiatan dakwah. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun pengorganisasian dakwah berjalan dengan baik, tantangan dalam menjaga keterlibatan aktif seluruh anggota partai</p>	
--	--	--	---	--

			tetap ada, terutama dalam situasi yang melibatkan berbagai kepentingan politik.	
3	Duwi Adhani	Fungsi pengorganisasian partai politik dalam mengembangkan dakwah Islam	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah efektif mengintegrasikan dakwah dalam aktivitas politiknya, yang berdampak pada pemberdayaan kader perempuannya. PKS mengadopsi struktur organisasi yang memfasilitasi kaderisasi yang disiplin dan terorganisir, termasuk spesialis kerja, departementalisasi, dan rentang kendali yang	Studi Deskriptif

			<p>efektif. Hal ini memastikan bahwa kader perempuan mendapatkan peran yang jelas dalam organisasi dan dapat aktif dalam dakwah sekaligus politik. Dengan begitu, inti dari hasil penelitian ini adalah bahwa struktur yang terorganisir ini tidak hanya meningkatkan operasional partai tetapi juga memperkuat kohesi ideologi dan pemberdayaan perempuan di PKS.</p>	
4	Vivih Asviah Haq	Peran Kader Perempuan Partai Keadilan	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah berhasil meningkatkan	Kualitatif deskriptif

		<p>Sejahtera (PKS) dalam Optimalisasi Partisipasi Politik Perempuan Melalui Program Pemberdayaan di Kota Depok Pasca Pemilu 2019</p>	<p>partisipasi perempuan melalui program Rumah Keluarga Indonesia (RKI), yang memadukan kader perempuan dalam aktivitas politik partai. Program ini, efektif dalam meningkatkan jumlah kader perempuan dari tahun 2021 hingga 2023, menggunakan pendekatan representatif deskriptif dan simbolik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap visi dan misi PKS. RKI tidak hanya</p>	
--	--	--	--	--

			<p>menekankan peran domestik perempuan, tetapi juga memperluas partisipasi mereka dalam politik yang lebih luas, membantu PKS membangun representasi politik perempuan yang lebih kuat di tingkat lokal dan nasional.</p>	
--	--	--	---	--

Temuan-temuan ini relevan untuk penelitian tentang organisasi Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat, khususnya Bagian Perempuan. Studi ini dapat menyelidiki penerapan spesialisasi kerja dan strukturisasi departemen dalam upaya peningkatan sumber daya anggota, terutama perempuan. Hasil penelitian Niki tentang kurangnya dinamisme dalam pembagian tugas dapat menjadi dasar evaluasi fleksibilitas organisasi Partai Keadilan Sejahtera dalam mendorong partisipasi perempuan. Sementara itu, temuan Asep mengenai efisiensi organisasi dan tantangan mempertahankan keterlibatan anggota dapat menjadi acuan untuk memastikan strategi Partai

Keadilan Sejahtera tidak hanya berfokus pada pembagian tugas, tetapi juga pada peningkatan partisipasi anggota perempuan dalam politik dan dakwah.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana organisasi internal dan strategi pemberdayaan di Bagian Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat diterapkan, serta mengevaluasi keberhasilannya dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan anggota perempuan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran praktis bagi Partai Keadilan Sejahtera untuk mengoptimalkan organisasi dan strategi pemberdayaannya, serta mengatasi tantangan dalam mempertahankan partisipasi aktif anggota perempuan dalam kegiatan partai dan dakwah.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan penetapan dan pengelompokan tugas serta pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi, seperti yang dikemukakan oleh Daft (2002). Sementara itu, Stoner dan Walker (1986) menekankan bahwa pengorganisasian adalah proses penyusunan dan pengalihan aktivitas kerja kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, pengorganisasian dapat dipahami sebagai metode pengaturan dan pengalokasian pekerjaan di antara anggota organisasi yang bertujuan mencapai efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. (Yusuf, 2023)

Menurut Barnard, Chester I (1938) organisasi didefinisikan sebagai bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama (Barnard, 1938). Dalam struktur organisasi, terdapat bagian-bagian atau satuan-satuan kerja yang saling berhubungan, yang dikenal sebagai departemen. Departementalisasi sendiri merupakan proses penentuan metode pengelompokan berbagai kegiatan dalam organisasi.

Rentang kendali atau rentang manajemen merujuk pada jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif dan efisien oleh seorang manajer, atau jumlah bawahan yang bertanggung jawab melapor kepada seorang atasan. Konsep ini, yang juga dikenal sebagai *span of control*, *span of authority*, *span of attention*, atau *span of supervision*, menjadi faktor penting yang mempengaruhi bentuk dan tinggi struktur organisasi. Meski belum ada ketentuan pasti mengenai jumlah ideal bawahan yang menjadi tanggung jawab seorang manajer, baik jumlah yang terlalu banyak maupun terlalu sedikit dapat berdampak kurang baik bagi organisasi.

Selanjutnya ada rantai komando yang merupakan garis wewenang yang berkelanjutan dari tingkat tertinggi hingga terendah dalam organisasi, yang menjelaskan struktur pelaporan antar anggota. Garis komando ini berfungsi sebagai formula untuk menjabarkan otoritas, komunikasi, dan tanggung jawab antar posisi dalam organisasi atau perusahaan. Sistem ini membantu karyawan mengidentifikasi pihak yang harus dihubungi ketika menghadapi masalah dan kepada siapa mereka bertanggung jawab.

Pelimpahan wewenang yang merupakan tahapan selanjutnya dalam sistem pengorganisasian didefinisikan sebagai proses pengalihan tugas kepada individu yang memiliki legitimasi dalam organisasi, yang dilakukan melalui mekanisme tertentu. Proses ini ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, dimana tanpa pelimpahan tersebut dapat menghambat proses pencapaian tujuan.

Pada akhirnya akan ditemukan konsep sentralisasi dan desentralisasi dipercaya oleh beberapa manajer sebagai cara untuk mengurangi beban manajer puncak. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua pekerjaan dapat didelegasikan, sehingga manajer harus mampu melakukan seleksi terhadap pekerjaan yang akan didelegasikan untuk mencegah kerugian atau kegagalan organisasi.

Salah satu poin penting dalam teori pengorganisasian Barnard yaitu pengawasan, yang tidak dapat dipisahkan dari proses evaluasi kinerja bawahan. Hal tersebut sesuai dengan teori manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Sadili (2010) sesuai dengan yang dijelaskan oleh Irawati dan Farradia bahwa manajemen sumber daya manusia meliputi delapan aspek utama salah satunya ada penilaian prestasi kerja. Dalam pelaksanaannya, pengawasan yang efektif hanya dapat terjadi apabila didukung oleh sistem penilaian kinerja yang objektif dan terstruktur.

Penilaian kerja merupakan elemen utama dalam memastikan bahwa pengorganisasian berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Melalui penilaian ini, dapat diperoleh gambaran konkret mengenai efektivitas pelimpahan wewenang, efisiensi departementalisasi, serta ketepatan rentang kendali yang diterapkan. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala membantu dalam memperkuat rantai komando dan meningkatkan kualitas komunikasi vertikal antara atasan dan bawahan.

Penilaian kinerja berperan penting sebagai alat untuk mendeteksi kendala-kendala dalam proses pengorganisasian, mencakup hambatan struktural, prosedural, maupun aspek tingkah laku pegawai. Kegiatan evaluasi membantu merefleksikan efektivitas keseluruhan sistem organisasi seperti yang dikemukakan Barnard. Maka dari itu, penggabungan antara fungsi pengorganisasian dengan mekanisme evaluasi kinerja menjadi sangat penting dalam membangun lingkungan kerja yang bertanggung jawab, terbuka, dan responsif menghadapi dinamika perubahan.

2. Landasan Konseptual

Pengorganisasian dapat diartikan sebagai suatu proses pengklasifikasian dan pembagian aktivitas/kerja dalam tujuan yang diharapkan oleh sebuah organisasi maka dengan pengorganisasian dapat membagi tugas dan tanggung jawab diantaranya oleh para pengurus agar semua dapat

berjalan efektif (Aliefiani Mulya Putri et al., 2022). Seperti firman Allah pada Al Quran surat Ash Shaff ayat 4 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai setiap perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatan karena hal tersebut membuat orang tersebut tidak layak untuk dikatakan sebagai orang yang beriman dikarenakan kejujuran adalah inti kekuatan (Ritonga et al., 2022). Ketidaksiuaian perkataan dan perbuatan adalah cerminan dari kurangnya integritas dan komitmen. Dalam konteks pengorganisasian, prinsip tersebut sangat relevan terutama dalam hal kepemimpinan

Proses pengorganisasian yang dijelaskan sebagai pengklasifikasian dan pembagian aktivitas/kerja dalam tujuan yang diharapkan sebuah organisasi, menyoroti bagaimana struktur organisasi dan pembagian peran dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

Struktur yang mempromosikan partisipasi perempuan membantu dalam menampilkan komitmen partai terhadap kesetaraan gender dan meningkatkan citra partai di mata publik. Selain itu, struktur organisasi

yang terorganisir baik memungkinkan evaluasi dan pengumpulan umpan balik yang efektif terhadap program-program yang dijalankan, memfasilitasi perbaikan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan kader perempuan. Oleh karena itu, mengkaji bagaimana Partai Keadilan Sejahtera mengorganisir strukturnya khususnya dalam bidang perempuan akan memberikan pemahaman tentang bagaimana struktur organisasi berpengaruh terhadap efektivitas strategi peningkatan sumber daya kader penggerak perempuan.

Selain itu, partai politik adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa (Rosana, 2012). Sedangkan menurut Budiarjo, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara (2003). Pengertian secara umum menurut Ibid yang dikutip oleh Rosana, secara umum partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama (2012). Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dalam merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Rosana, 2012).

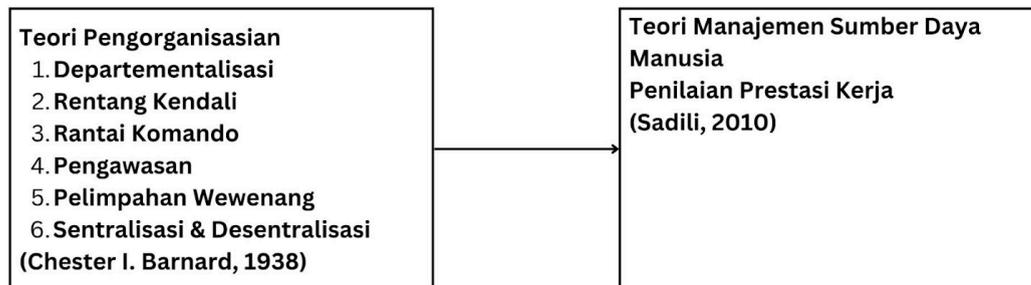
Robbins dan Coulter (2016: 39) mendefinisikan manajemen sebagai "proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain".

Definisi ini menekankan pentingnya koordinasi dan peran sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi secara optimal.

Dalam konteks partai politik, khususnya partai politik Islam, manajemen organisasi memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas partai dalam mencapai tujuannya. Hal ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan upaya meningkatkan sumber daya kader perempuan, yang merupakan bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia partai. Sebagaimana dikemukakan oleh Katz dan Mair (1995:18), partai politik berfungsi sebagai "jembatan antara masyarakat sipil dan negara", yang mengimplikasikan pentingnya representasi yang inklusif, termasuk keterwakilan perempuan dalam struktur partai.

Partisipasi aktif perempuan dalam politik melalui partai politik Islam memberikan dampak positif, antara lain meningkatkan representasi perempuan, memperkuat legitimasi politik partai, serta menciptakan kebijakan yang lebih inklusif. Keterlibatan perempuan yang lebih kuat memungkinkan partai politik menangkap aspirasi perempuan secara lebih baik dan memperluas basis dukungan. Selain itu, kebijakan partai juga akan lebih mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, teori-teori yang telah diuraikan diatas memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana pengorganisasian partai politik Islam dapat meningkatkan sumber daya kader perempuan. Kombinasi antara teori partai politik, pengorganisasian, peningkatan sumber daya perempuan, serta perspektif Islam tentang politik dan gender memberikan

landasan yang komprehensif untuk menganalisis peran kader perempuan di Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan keterlibatan perempuan di ranah politik.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Pengorganisasian Partai Politik Islam dalam Meningkatkan Sumber Daya Kader Penggerak Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung yang berada di Jl. Soekarno-Hatta No.538 A, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keaktifan DPW Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung dalam menjalankan program-program politik dan pemberdayaan kader perempuan. DPW Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung dipandang sebagai tempat yang strategis untuk mengkaji pengorganisasian partai politik Islam, khususnya dalam konteks

pemberdayaan kader perempuan, karena keterlibatan perempuan dalam politik di wilayah ini cukup aktif dan terstruktur. Selain itu, kegiatan DPW Partai Keadilan Sejahtera di Provinsi Jawa Barat juga memberikan gambaran nyata mengenai penerapan strategi politik Islam dalam meningkatkan peran perempuan dalam organisasi partai dan ranah politik lokal.

Lokasi ini diharapkan dapat memberikan data yang relevan dan mendukung untuk mengukur efektivitas upaya peningkatan kualitas sumber daya kader penggerak perempuan yang dijalankan oleh Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat serta bagaimana pengorganisasian partai berkontribusi pada peningkatan representasi perempuan di politik tingkat lokal.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang sesuai adalah paradigma konstruktivis. Dalam konteks penelitian ini, paradigma konstruktivis digunakan untuk memahami bagaimana Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat, khususnya di Bidang Perempuan, membentuk dan memaknai proses pengorganisasian dan pemberdayaan perempuan di ranah politik. Konstruksi sosial mengenai peran perempuan dalam partai politik Islam menjadi aspek penting yang ditelaah dalam penelitian ini.

Paradigma konstruktivis memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif, pengalaman, dan pemahaman subjek penelitian

(kader perempuan) terkait dengan pengorganisasian partai dan bagaimana mereka memberdayakan diri dalam konteks politik lokal. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah pada makna subjektif yang dibangun oleh para kader perempuan dan bagaimana mereka menafsirkan partisipasi politik mereka dalam struktur partai.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam proses, strategi, dan pengalaman kader perempuan dalam pengorganisasian dan pemberdayaan di Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan dari perspektif partisipan penelitian. Pendekatan kualitatif ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data numerik, tetapi lebih pada pengumpulan informasi yang dapat membantu mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang terkait dengan partisipasi politik perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memecahkan permasalahan penelitian secara mendalam melalui tahapan pengumpulan, klasifikasi, analisis, serta penyajian data secara terperinci. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena sosial yang sedang diteliti, serta mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang

relevan dalam pengorganisasian kader penggerak perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung. Melalui pendekatan yang sistematis ini, peneliti dapat memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan penelitian.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan berbentuk studi kasus. Berdasarkan yang dikutip oleh Sadiyah, D. menurut Sumadi Suryabrata tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat (2015).

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua sumber ini saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pengorganisasian Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan pemberdayaan kader perempuan.

Sumber data primer berasal dari kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera yang aktif dalam kegiatan politik dan pemberdayaan, pengurus partai yang bertanggung jawab atas Bidang Perempuan, serta

tokoh-tokoh kunci partai yang memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Provinsi Jawa Barat.

Sumber data sekunder meliputi dokumen-dokumen partai seperti AD/ART, pedoman organisasi, program kerja, laporan tahunan, artikel jurnal, buku, serta literatur akademik lainnya yang relevan dengan pengorganisasian partai politik Islam dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, laporan-laporan dari lembaga-lembaga terkait politik perempuan dan pemberdayaan gender juga dijadikan sebagai sumber data sekunder.

Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian ini dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai pengorganisasian Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan pemberdayaan kader perempuan.

5. Informan atau unit analisis

Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pengorganisasian dan pemberdayaan kader perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung. Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling, di mana informan dipilih secara sengaja berdasarkan relevansi mereka dengan topik penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kader Penggerak Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat: Ketua Deputy Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga yang aktif dalam berbagai kegiatan partai, terutama yang terlibat dalam program pemberdayaan dan kegiatan politik, menjadi informan utama. Mereka akan memberikan wawasan mengenai pengalaman, tantangan, serta dampak dari pengorganisasian partai terhadap keterlibatan mereka dalam politik.
- b. Pengurus Partai di Bidang Perempuan: Pengurus yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Partai Keadilan Sejahtera juga akan menjadi informan. Mereka memiliki pengetahuan tentang strategi, program kerja, dan tujuan partai dalam meningkatkan peran perempuan di politik lokal.
- c. Tokoh Kunci Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung: Sekretaris Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung.

Informan dipilih dengan pertimbangan mereka dapat memberikan data yang relevan dan mendalam, baik dari perspektif kebijakan partai maupun pengalaman lapangan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah proses pengorganisasian Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung dalam meningkatkan sumber daya kader penggerak perempuan. Penelitian akan fokus pada bagaimana struktur, strategi, dan program yang dirancang oleh partai mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik dan

dakwah. Analisis akan mencakup berbagai elemen pengorganisasian, seperti:

- a. Struktur Organisasi Bidang Perempuan: Bagaimana partai mengatur dan membentuk struktur organisasi khusus untuk perempuan, serta bagaimana perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan di dalam partai.
- b. Strategi Peningkatan Sumber Daya Kader Perempuan: Strategi apa yang diterapkan partai untuk meningkatkan sumber daya kader perempuan, termasuk program pelatihan, pendidikan politik, serta inisiatif lain yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam politik.
- c. Keterlibatan dan Peran Kader Perempuan: Peran aktif perempuan dalam kegiatan partai, mulai dari kampanye hingga pengambilan keputusan politik, serta bagaimana mereka menghadapi tantangan di ranah politik lokal.

Unit analisis ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pengorganisasian partai politik Islam, khususnya dalam meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi berbagai metode yang bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam dan komprehensif mengenai pengorganisasian Partai Keadilan Sejahtera

Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan pemberdayaan kader perempuan.

Teknik pengumpulan data tersebut meliputi:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera, seperti pertemuan kader perempuan, pelatihan politik, atau kegiatan lain yang berkaitan dengan program pemberdayaan. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi sehingga *observer* dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah dan petunjuk untuk memecahkannya (Mania, 2008). Observasi ini bertujuan untuk mengamati secara langsung interaksi antar anggota partai, dinamika pengorganisasian, serta proses pemberdayaan perempuan di dalam partai. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih kontekstual dan memahami situasi nyata yang dialami kader perempuan dalam organisasi.

b. Wawancara

Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama dalam mengumpulkan data primer. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti memiliki daftar pertanyaan sebagai panduan, tetapi tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk memberikan jawaban yang lebih luas dan eksploratif. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi dari kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera, pengurus partai di Bidang

Perempuan, serta tokoh kunci partai yang terkait dengan pengorganisasian dan pemberdayaan perempuan. Wawancara mendalam membantu peneliti untuk memperoleh wawasan mengenai pengalaman, tantangan, serta pandangan para informan terhadap strategi pemberdayaan perempuan yang diterapkan oleh partai.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai dokumen resmi partai yang terkait dengan pengorganisasian dan pemberdayaan perempuan. Dokumen yang dianalisis meliputi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pedoman organisasi partai, program kerja Bidang Perempuan, laporan kegiatan tahunan, serta materi dari pelatihan dan program pemberdayaan kader perempuan. Data ini akan memberikan informasi mengenai kerangka formal yang digunakan oleh partai dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

a. Triangulasi Data

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dengan cara ini, peneliti dapat memverifikasi konsistensi dan akurasi informasi

yang didapatkan dari berbagai sumber dan metode. Triangulasi juga membantu peneliti untuk memastikan bahwa data yang terkumpul dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengorganisasian dan pemberdayaan perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat.

Dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai teknik tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi konsistensi atau perbedaan dalam data yang dikumpulkan, sehingga keakuratan data dapat dipastikan.

b. *Member Check* (Pemeriksaan oleh Informan)

Teknik member check dilakukan dengan meminta informan untuk memverifikasi atau mengkonfirmasi kembali hasil wawancara atau temuan sementara peneliti. Setelah data wawancara atau observasi diolah, peneliti akan menyampaikan hasil sementara tersebut kepada informan untuk mengecek apakah interpretasi dan kesimpulan yang dibuat peneliti sesuai dengan maksud mereka. Ini memastikan bahwa data yang diperoleh adalah representasi yang benar dari pengalaman dan pandangan informan, serta menghindari kesalahan interpretasi.

Dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai teknik tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi konsistensi atau perbedaan dalam data yang dikumpulkan, sehingga keakuratan data dapat dipastikan.

8. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam proses pengorganisasian Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan kualitas kader penggerak perempuan.

a. Reduksi Data

Tahap pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data, yaitu proses menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumen. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian, yaitu strategi pengorganisasian Partai Keadilan Sejahtera dalam pemberdayaan kader perempuan. Proses reduksi data, di lapangan dilakukan pencatatan dan merangkum data data penting yang mampu mengupas tema permasalahan (Dewi Saidah, 2015). Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data sesuai dengan kategori atau tema utama yang muncul selama proses pengumpulan data, seperti struktur organisasi, strategi pemberdayaan, dan tantangan yang dihadapi kader perempuan.

b. Penyajian Data

Setelah reduksi data dilakukan, langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan mengklasifikasikan informasi ke dalam satuan-satuan analisis sesuai fokus dan aspek permasalahan yang diteliti. Display data merupakan mengklasifikasikan pada satuan-satuan analisis sesuai fokus dan aspek permasalahan yang diteliti, atau data yang banyak,

laporan lapangan yang tebal, dengan sendirinya akan sukar melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang tepat (Dewi Sadiyah, 2015).

Setelah reduksi data dilakukan, langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk narasi deskriptif atau diagram yang membantu peneliti memahami pola dan hubungan antar data.

c. Menyimpulkan Data

Menyimpulkan data dan verifikasi dengan data - data baru yang memungkinkan mendapat keabsahan hasil penelitian (Dewi Sadiyah, 2015:93). Proses menyimpulkan data melibatkan pengambilan kesimpulan dari informasi yang telah direduksi dan ditampilkan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan data baru atau data tambahan yang memungkinkan mendapatkan keabsahan hasil penelitian.

Dengan menggunakan teknik analisis data ini, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai strategi pengorganisasian Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung dalam peningkatan sumber daya kader penggerak perempuan. Teknik ini juga membantu peneliti mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan bagaimana partai dapat meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik lokal.